

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Akuntansi sektor publik merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang berkembang dengan pesat pada akhir-akhir ini, hal ini karena perhatian masyarakat terhadap pemerintah serta tuntutan untuk transparansi atas kinerjanya maka kemudian diwujudkan dalam laporan keuangan ataupun kinerja yang disusun oleh pemerintah diperuntukkan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam setiap laporan keuangan berisi informasi keuangan yang dapat digunakan dalam mengambil kebijakan investasi ataupun ekonomi.

Akuntansi pemerintahan dapat berupa pemerintah pusat, kabupaten kota serta yang paling dekat dengan masyarakat yaitu pemerintahan desa. Menurut BPD, desa mempunyai peran yang besar dalam menjalankan roda perekonomian sehingga masyarakat dapat keluar dari lingkaran setan. Dengan peran yang besar maka pemerintah desa juga disertai dengan tanggung jawab yang besar, yaitu desa harus bisa menerapkan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Dimana setiap akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Fenomena yang ada dalam laporan keuangan desa menurut BPKP ialah pemerintah desa belum disertai dengan SDM yang memadai baik

dari segi kualitas maupun kualitas. Kendala yang selanjutnya karena desa belum memiliki sarana prasarana dalam pengelolaan keuangan serta fenomena pejabat pemerintah yang terjerat hukum pidana karena kasus penggelapan keuangan. Sehingga BPD menyatakan bahwa aparatur pemerintah harus mempunyai pemahaman atas perundang undangan serta memiliki kemampuan dalam pencatatan akuntansi dan juga pelaporannya.

Desa yang ada di Kabupaten Majalengka mempunyai fenomena yang sama dengan fenomena secara keseluruhan yaitu aparatur pemerintah desa belum memadai dan juga kemajuan teknologi informasi yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya walaupun sebenarnya teknologi informasi sudah dapat diakses hingga ke pedesaan. Fenomena lainnya adalah bahwa entitas sektor publik yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan Standar akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan (Aditia dan Andriany, 2019).

Dalam perencanaan strategis tahun 2013 – 2018 yang ada dalam kecamatan Lemahsugih, dikatakan bahwa permasalahan yang ada dalam kecamatan Lemahsugih ialah dengan adanya perkembangan teknologi informasi sehingga dituntut peran seluruh yang ada dalam kecamatan dalam hal transparan dari segala informasi.

Asas Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Permendari Nomor 113 tahun 2014 yaitu bahwa laporan keuangan harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan teratur pada setiap waktu laporan dan juga disiplin anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa yang membentuk kualitas dari laporan keuangan yang baik mempunyai kriteria dan unsur yang terdiri dari relevan; Andal; tepat waktu; dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan yang andal ialah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan fakta yang ada secara jujur, dapat diverifikasi serta terbebas dari kesalahan material atau tidak menyesatkan (Inayati dan Reuni, 2018). Dari penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa keandalan laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material yang artinya laporan keuangan ini harus disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah yang ada.

Untuk bebas dari kesalahan materil, disajikan sesuai fakta maka hal ini tidak terlepas dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, pimpinan sektor publik dan juga personal yang terlibat di dalamnya) untuk memberikan kepercayaan tentang tujuan keandalan laporan keuangan (Trisnani, Dimiyati dan Paramu, 2017). Sistem pengendalian internal atau SPI yang baik diharapkan dapat meningkatkan keandalan sehingga dapat meyakinkan publik dan juga pengguna laporan keuangan tentang keakuratan laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah.

Laporan keuangan yang baik dan benar serta berkualitas tidak lepas dari sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Masih

terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dapat berdampak pada laporan keuangan yang jauh dari kata baik. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh aparat pemerintah desa tersebut kurang bermanfaat bagi sejumlah pemakai laporan keuangan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan aturan serta standar yang ada (Perencanaan strategis, 2013/2018).

Aparatur pemerintahan desa juga tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akan bidangnya khususnya bidang keuangan. Terlepas dari itu sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dalam hal teknologi, karena seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi semakin mendunia maka memanfaatkan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan keandalan dalam laporan keuangan.

Dalam Q.S Al- baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman :

كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكُنَّ بِكُمْ مِّمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْدُورُ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْدُورُ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْدُورُ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْدُورُ مِمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقْدُورُ
وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَمُنِّدُوا نَحْمَدُكَ يَا أَيُّهَا
اللَّهُ الْعَدْلُ

Yang artinya : Hai orang orang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya... (282)

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa dari setiap mu'amalah yang dilakukan harus dicatat dengan benar. Hal ini sesuai dengan keandalan laporan keuangan dimana dalam unsur keandalan pada setiap transaksi yang ada harus dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Begitupun dengan unsur dari laporan keuangan dimana aparaturnya harus menyajikan semua unsur laporan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara general BPK-RI yang memberikan kewenangan akan opini audit pada laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian apabila sistem pengendalian internal memadai, tidak ada salah saji yang material atas pos pos laporan keuangan dan secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP yang ada. Sesuai dengan data yang ada bahwa opini audit yang dikeluarkan BPK untuk bahwa kabupaten Majalengka mendapat opini audit hingga 2018 ini.

Akibat dari lemahnya pengelolaan keuangan yang terjadi pada tahun tersebut ialah terjadinya kasus penggelapan yang dilakukan oleh aparat desa (www.radarcirebon.com). Hal ini selaras dengan yang kasus yang terjadi pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 dikatakan bahwa dana desa Majalengka bocor hingga Rp. 2 Miliar, menurut keterangan kepala Inspektorat Pengawasan Daerah kabupaten Majalengka menyatakan bahwa kebocoran anggaran tersebut dapat diketahui berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Auditor dari Inspektorat. Kepala inspektorat menjelaskan hal ini bisa terjadi karena

beberapa faktor yaitu pajak yang belum dibayarkan, ada kekurangan volume pekerjaan bagi desa yang mengerjakan pembangunan fisik namun belum mempertanggungjawabkan keuangan yang diterimanya, sementara uang sudah diambil dan digunakan serta penggunaan dana yang tidak jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk fisik (www.pikiranrakyat.com).

Dari kasus diatas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah desa kabupaten Majalengka belum dapat dikatakan andal karena belum memenuhi unsur keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah desa mengenai dana desa sudah tidak memenuhi unsur penyajian yang jujur yang artinya pemerintah desa belum mencatat transaksi sesuai dengan transaksi yang telah terjadi.

Menurut penjelasan di atas, maka sekiranya diperlukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Desa dengan Pemanfaatan teknologi sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Dalam penelitian Kusuma dan Andryani (2017) dengan judul Pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi Informasi, dan sistem pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini menemukan bahwa secara keseluruhan berpengaruh

signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Namun secara parsial sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan keuangan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan audit keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada penambahan variabel standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal. Perbedaan selanjutnya terletak pada variabel pemanfaatan teknologi informasi, dimana pada penelitian sebelumnya variabel ini menjadi variabel independen sedangkan pada penelitian ini menjadi variabel moderasi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah penerapan SAP berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan aparatur pemerintah desa?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan aparatur pemerintah desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah desa ?

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan keandalan laporan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan :

1. Memberikan bukti dan menganalisis apakah pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah desa.
2. Memberikan bukti dan menganalisis apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan desa.
3. Memberikan bukti dan menganalisis apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan desa
4. Memberikan bukti dan menganalisis apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan keandalan laporan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa sebagai informasi terkait dengan kinerja pemerintah desa

agar lebih maksimal dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ada dan juga peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, sebagai informasi tambahan dalam melakukan penelitian terkait dengan akuntansi sector [public dan dapat membantu mahasiswa untuk mempermudah dalam membuat penelitiannya.